

## Analisa Kontinuitas Inovasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Faidzan Nur Yasin<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Kementerian Dalam Negeri  
e-mail : [fn81630@gmail.com](mailto:fn81630@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat ketidakberlanjutan inovasi aplikasi Sistem Informasi Monitoring Elektronik Keuangan (SiMOLEK) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada tahap evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan kunci yang memiliki kewenangan serta peran penting dalam pengoperasian SiMOLEK. Faktor-faktor penghambat yang dianalisis dalam penelitian ini didasarkan pada studi sebelumnya yang dilakukan oleh Deloitte dan KPMG, yaitu faktor politik, keterbatasan keuangan, kepemimpinan, teknologi, budaya, dan kurangnya keterampilan teknis. Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang menyebabkan ketidakberlanjutan inovasi aplikasi SiMOLEK meliputi faktor politik, keterbatasan keuangan, kepemimpinan, serta teknologi. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi dan pengelolaan aplikasi SiMOLEK, yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi upaya perbaikan sistem keuangan daerah di masa mendatang.

**Kata Kunci:** *inovasi, pengelolaan keuangan daerah, ketidakberlanjutan, hambatan.*

## *Analysis Of Regional Finance Management Innovation Continuity*

### *Abstract*

*This study aims to identify the factors hindering the sustainability of the innovation of the Electronic Financial Monitoring Information System (SiMOLEK) application, developed by the Ministry of Home Affairs, in the management of regional finances, particularly in the accountability evaluation process of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) implementation. The research uses a qualitative descriptive approach, with data obtained through observation and in-depth interviews with key informants who have authority and significant roles in the operation of SiMOLEK. The hindering factors analyzed in this study are based on previous research conducted by Deloitte and KPMG, which include politics, lack of finance, leadership, technology, culture, and lack of technical skills. According to the research findings, the main factors contributing to the unsustainability of the SiMOLEK application innovation are politics, lack of finance, leadership, and technology. This study provides a clearer understanding of the challenges faced in the implementation and management of the SiMOLEK application, offering valuable insights for future improvements in the regional financial system.*

**Keywords:** *innovation; regional finance, unsustainability, obstacles.*

### A. PENDAHULUAN

Inovasi sektor publik merupakan hal penting dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah sehingga lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah. Terdapat banyak inovasi pada sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dapat dinilai sebagai komitmen untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Inovasi

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

sektor publik dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu [1] pelayanan, produk, kebijakan, [2] proses atau organisasi, dan [3] tata kelola pemerintahan (Chen et al., 2020).

Sebagai upaya dalam mendorong kebijakan inovasi dan reformasi manajemen pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat suatu inovasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Inovasi tersebut berupa pembangunan aplikasi untuk memfasilitasi layanan pengelolaan keuangan daerah secara online dengan nama Sistem Informasi Monitoring Elektronik Keuangan (SiMOLEK). SiMOLEK dibuat agar pengelolaan keuangan daerah dapat lebih tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta menjadi jawaban terhadap keinginan masyarakat yang menuntut pemerintah yang responsif, produktif, dan memberikan solusi-solusi dalam percepatan pembangunan sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terkecuali (Kemendagri:2018).

APBD merupakan sebuah instrumen keuangan daerah yang digunakan sebagai dasar untuk membiayai operasional kegiatan pemerintahan daerah. Selain itu, APBD merupakan sebuah alat yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan

keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah yang dalam penyusunannya harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan (Yulianti:2017). Ketika APBD telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah maka secara normatif pembelakuannya dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan, sehingga pada saat akhir tahun anggaran berakhir maka dimulailah proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah sebuah manifestasi dari pemerintahan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD. Mekanisme Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan setelah proses penyusunan

rancangan APBD (RAPBD), persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan RAPBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, pelaksanaan APBD telah selesai dilaksanakan (Mailinda dan Andrianto,2013). Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah (ranperda) yang selanjutnya ranperda tersebut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, akan dievaluasi terlebih dahulu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal di Kemendagri yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses evaluasi oleh Ditjen Bina Keuda terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mengacu pada Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan evaluasi dilaksanakan selama 15 hari kerja sejak ranperda diterima oleh Kemendagri. Dalam pelaksanaan evaluasi, Kemendagri akan menilai apakah ranperda dimaksud telah sesuai dengan Perda tentang APBD, Perkada tentang penjabaran APBD dan telah menindaklanjuti hasil temuan Badan pemeriksa Keuangan. Indikator penilaian sebagaimana dimaksud, menurut Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan 3 aspek yaitu; [1] Konsistensi, yakni untuk menilai kesesuaian antara pagu anggaran, nomenklatur anggaran, serta struktur dan klasifikasi APBD dengan ranperda pertanggungjawaban APBD; [2] Kebijakan, yakni untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD; dan [3] Legalitas, yakni untuk menilai kepatuhan atas landasan yuridis dan penyajian informasi dalam penyusunan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Melalui kehadiran SIMOLEK, proses evaluasi ranperda oleh Ditjen Bina Keuda yang semula dilakukan secara manual atau konvensional kemudian berubah dilakukan secara online. SiMOLEK terpusat pada server Ditjen Bina Keuda dan akan menghubungkan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan Kemendagri, sehingga apabila dilihat dari hubungan atau interaksi antar pengguna, SIMOLEK tergolong sebagai inovasi yang bersifat Government to Government (G2G) yakni sistem informasi yang menautkan 2 (dua) entitas pemerintahan yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Hadi dkk:2022).

Penggunaan SiMOLEK memiliki kelebihan baik untuk kontributor data (Pemda) maupun Evaluator (Ditjen Bina Keuda). Berbagai manfaat yang didapatkan oleh Pemda apabila menggunakan SiMOLEK dalam proses evaluasi sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 1 yang menunjukkan perbandingan antara proses evaluasi yang menggunakan SiMOLEK dengan proses evaluasi yang konvensional dari sisi pemda sebagai kontributor data.

**Tabel 1.**  
Perbandingan Sumber Daya yang Dibutuhkan Antara Evaluasi Melalui Konvensional dengan SIMOLEK

No.	Perbandingan	Konvensional	SIMOLEK
1	Biaya	Mahal (penyampaian data harus secara langsung sehingga membebani anggaran untuk perjalanan dinas)	Murah (penyampaian data melalui aplikasi)
2	Waktu	2-3 hari	1 Hari
3	Kelengkapan dan Keakuratan Data	Teridentifikasi setelah bertatap muka dengan evaluator	Langsung teridentifikasi secara otomatis oleh aplikasi
4	Dokumen	Menggunakan sekitar 3-4 rim kertas	Tidak ada
5	Proses Perbaikan Data	Tidak dapat langsung diperbaiki sehingga memakan waktu, tenaga dan biaya yang tinggi	Dapat langsung diperbaiki pada aplikasi

Sumber: Kemendagri, 2023

Berdasarkan tabel di atas, tergambar dengan jelas penggunaan SiMOLEK dari sisi Pemda sangat efektif dan efisien dalam menyampaikan sekaligus memperbaiki data/dokumen evaluasi kepada Kemendagri selaku evaluator. Kelebihan ini juga mendapatkan testimoni positif dari sejumlah pejabat keuangan pemerintah daerah, salah satunya Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang pada saat melaksanakan konsultasi ke Ditjen Bina Keuda menyatakan bahwa sangat terbantu dengan hadirnya SiMOLEK dalam pelaksanaan evaluasi Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada saat melakukan konsultasi ke Ditjen Bina Keuda menyatakan bahwa dengan adanya SiMOLEK sangat menghemat pengeluaran anggaran kantor, khususnya dalam pencetakan dokumen.

Ditjen Bina Keuda Kemendagri selaku evaluator dalam melakukan evaluasi, dimana proses evaluasi dapat menjadi lebih efektif. Hal tersebut juga diakui oleh Koordinator Evaluasi Wilayah Sumatera I yang mengatakan bahwa dengan adanya SiMOLEK,



# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

maka proses evaluasi menjadi sangat mudah untuk mengidentifikasi data, mudah dalam pengerjaan serta cepat dan tepat waktu. Keberadaan SiMOLEK ini secara garis besar merupakan sebuah inovasi dalam bidang keuangan daerah yang memberikan manfaat dan menciptakan perubahan positif bagi organisasi (Drucker:1985). Pelaksanaan evaluasi ranperda pelaksanaan pertanggungjawaban APBD yang sangat berat dan membutuhkan waktu yang lama, menjadi mudah sekaligus murah serta mampu menciptakan solusi terhadap tantangan dan hambatan pada saat yang sama bagi kedua *users*.

Namun pada tahun 2022, pengoperasian SiMOLEK dihentikan dalam proses evaluasi ranperda pertanggungjawaban APBD. Hasil inovasi yang telah memberikan manfaat serta testimoni positif dari sejumlah pejabat keuangan pemerintah daerah, namun harus terhentikan penggunaannya. Seyogyanya pelaksanaan inovasi tersebut terus dilanjutkan untuk menghadapi kebutuhan atau permasalahan di waktu yang akan datang sekaligus sebagai wujud dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik dan handal (*good governance*).

Telah terdapat beberapa kajian terkait hambatan yang umumnya menjadi tantangan dalam pelaksanaan inovasi pada sektor publik. Beberapa yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan inovasi diantaranya kapasitas birokrasi dan ketersediaan anggaran, dukungan politik pemerintah, peran kepemimpinan, keberadaan sumber daya manusia yang berbakat dan tingkat pengetahuan dan keterampilan (Trivellato et al., 2021), inovasi tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan sistem reward and punishment yang belum jelas (Deby et al., 2018), tata kelola resiko (Adyawarman, 2021), kurangnya integrasi dari satu sistem yang lainnya (Lukman, 2021); kurangnya kolaborasi antara organisasi publik, aktor swasta, dan organisasi nirlaba (Pratama, 2019).

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik meneliti faktor-faktor yang menyebabkan

aplikasi SiMOLEK dihentikan pengoperasiannya serta mencari alternatif solusi dalam memecahkan masalah yang timbul sebagai dampak dari penghentian beroperasinya SiMOLEK. Selain itu melalui penelitian ini juga bermaksud untuk memperkaya studi yang telah ada tentang inovasi sektor publik, terutama spesifik mengkaji hambatan yang ditemui dalam inovasi sektor publik.

## B. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metodologi kualitatif deskriptif berdasarkan studi kasus (Creswell, 2014) yang mengartikan studi kasus adalah penelitian yang dilakukan spesifik pada kasus-kasus tertentu dalam fenomena sosial politik berdasarkan pendekatan ilmiah dengan bersumber pada data, sumber dan informasi yang valid.

Pendekatan melalui studi kasus juga dianggap sangat sesuai karena dapat menjawab mengapa dan bagaimana atas fenomena yang terjadi (Yin, 2006). Sejalan dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan untuk menjawab apa yang menjadi penyebab terhambatnya pengoperasian aplikasi SiMOLEK dan berusaha untuk mencari alternatif solusi dari permasalahan tersebut.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara yaitu primer dan sekunder. Data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap beberapa informan kunci yang memiliki kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penanggungjawab pengoperasian SiMOLEK. Sementara data sekunder diperoleh dari website, jurnal dan literatur yang relevan lainnya. Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan triangulasi sehingga hanya data yang teruji kebenarannya yang disajikan dalam artikel ini.

## C. PEMBAHASAN

Halangan dan hambatan dalam berinovasi seringkali dikategorikan dalam 2 hal, yang pertama adalah aspek internal (meliputi

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

proses perubahan dalam organisasi) dan aspek eksternal (meliputi sumber daya dan pengetahuan serta regulasi) (Madeira, 2017). Di era yang mendorong adanya transformasi digital sekarang ini, sehingga menuntut perubahan yang sangat cepat yang akibatnya menciptakan kondisi bubble innovation, akan tetapi secara paradoks implementasi inovasi menjadi sangat sulit, rentan gagal dan mengandung banyak resiko dan hambatan (Silva dkk, 2019). Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Delloite dan KPMG menunjukkan beberapa faktor yang dapat menjadikan penyebab terhambatnya sebuah inovasi (Akhmadi dan Tsakalerou, 2020) yaitu:

**Tabel 2**  
Faktor-faktor penyebab terhambatnya sebuah inovasi

Deloitte	KPMG
1. <i>Sensing and scanning mew technologies and trends;</i>	1. <i>Politics/turf wars/no alignment</i>
2. <i>Security Issues;</i>	2. <i>Cultural issues</i>
3. <i>Lack Of Technical Skills;</i>	3. <i>Lack budget</i>
4. <i>Cultural Resistance to Risk Taking and Failing;</i>	4. <i>Lack strategy and vision</i>
5. <i>Lack of Leadership and Management Skills;</i>	5. <i>Recruiting/ not enough of high demand skill set</i>
6. <i>Uncertain demand for new goods and service;</i>	6. <i>Not adopting emerging technologies</i>
7. <i>Availability of technology providers to train;</i>	7. <i>Lack of executive support</i>
8. <i>Lack of access to funds;</i>	8. <i>Other</i>
9. <i>Lack of time to develop new ideas;</i>	9. <i>Inability to pick up signals critical to future business</i>
10. <i>Lack of government support for innovation.</i>	

Sumber: Akhmadi dan Tsakalerou, (2020)

Berdasarkan tabel di atas, maka Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat inovasi sehingga menyebabkan terhentinya pengoperasian aplikasi SiMOLEK, maka peneliti akan menggunakan pisau analisis faktor penghambat inovasi yang digunakan oleh Deloitte dan KPMG. Dalam penelitian ini, faktor-faktor penghambat inovasi yang digunakan oleh Deloitte dan

KPMG tidak secara keseluruhan digunakan akan tetapi dipilih faktor-faktor yang dianggap relevan dengan objek penelitian pada sektor publik, hal ini disebabkan karena pada dasarnya faktor – faktor penghambat yang digunakan oleh Deloitte dan KPMG adalah untuk menganalisis inovasi pada sektor privat yang kondisi dan keadaannya berbeda dengan sektor publik. Faktor-faktor penghambat lainnya walaupun semuanya tidak terakomodir, namun secara substantif sudah termuat dalam faktor faktor yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Adapun faktor-faktor yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menggambarkan penyebab ketidakberlanjutan pengoperasian SiMOLEK yaitu *politics, lack of finance, leadership, technology, culture* dan *lack of technical skills*.

### 1) *Politic*

Perubahan arah politik seringkali menjadi salah satu sumber pemicu ketidakberlanjutan sebuah inovasi (Nadeem et al., 2020). Arah politik menjadi sandaran dan acuan penyusunan program-program di dalam sebuah organisasi sehingga apabila garis politik berubah haluan maka kemungkinan terjadinya perubahan program dan kebijakan dalam sebuah organisasi akan sangat besar. Perubahan program dan kebijakan ini berimplikasi terhadap pembuatan agenda organisasi terbaru sehingga membuang atau memberhentikan agenda – agenda yang telah lama dijalankan dalam sebuah organisasi.

Keadaan ini merupakan salah satu jawaban kenapa aplikasi SiMOLEK berhenti pengoperasiannya. Perubahan kepemimpinan berdampak pada perubahan arah politik penyusunan agenda kebijakan Ditjen Bina Keuda. Berdasarkan penuturan dari informan yang mengembangkan aplikasi SiMOLEK menyatakan bahwa perubahan pucuk pimpinan menyebabkan sejumlah perubahan kebijakan termasuk kebijakan sistem informasi yang telah lama dioperasikan di Ditjen Bina Keuda.

Tak hanya SiMOLEK, tetapi juga beberapa sistem informasi keuangan serupa dihentikan pengoperasiannya dengan alasan akan ada peleburan aplikasi-aplikasi keuangan menjadi

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

satu aplikasi keuangan secara umum. Kebijakan ini dikenal sebagai aplikasi *microservices* dimana seluruh aplikasi keuangan yang bersifat monolitik akan digabungkan menjadi satu *super apps* dengan pelayanan server yang berbasis *cloud* terintegrasi. Hal ini diyakini dapat membuat aplikasi – aplikasi berjalan lebih optimal, lebih mudah *maintenance* dan memperkecil resiko *data security*. Nantinya *SiMOLEK* yang telah dihentikan namun akan diaktifkan kembali dalam aplikasi tersebut yang dinamakan *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)* yang dari segi *business process* tidak akan mengalami perubahan akan tetapi secara performa aplikasi akan ditingkatkan.

## 2) *Lack Of Finance*

Faktor pendanaan memegang peranan penting dan vital dalam sebuah pengembangan inovasi. Ketersediaan biaya dapat menunjang proses pelaksanaan *research and development (RnD)*, dengan adanya *RnD* inilah menjadikan keberlanjutan sistem informasi yang dibangun oleh sebuah organisasi (Yin et al., 2023). Keterbatasan dana dalam inkubasi inovasi dalam sektor publik bukanlah barang baru, tetapi sudah menjadi fenomena yang sangat lumrah sehingga berimplikasi terhadap ketidakberlanjutan sebuah kebijakan karena dianggap masih ada kebijakan yang lebih prioritas.

Kepala Seksi dukungan teknis dan teknologi mengungkapkan bahwa pembuatan, pengoperasian serta pengembangan *SiMOLEK* sama sekali tidak mendapatkan suntikan dana sepeserpun dari *DIPA Ditjen Bina Keuda*. Gagasan menciptakan *SiMOLEK* merupakan sebuah inovasi yang dilakukan secara mandiri dengan dorongan spirit positif demi peningkatan kinerja layanan *Ditjen Bina Keuda*. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, maka kebutuhan dana untuk pengoperasian *SiMOLEK* menjadi sebuah keharusan yang harus tersedia. Manajemen server dan pemeliharaan situs tentu membutuhkan dana yang tidak bisa selalu bersumber dari dana pribadi tetapi harus ada dukungan dari organisasi.

Upaya untuk mengusulkan dana pengembangan serta pemeliharaan *SiMOLEK* sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak terkabulkan dikarenakan alasan masih ada program dan kegiatan yang jauh lebih prioritas untuk dibiayai. Begitu juga upaya mencari dana melalui kolaborasi dengan sektor swasta yakni *world bank*, akan tetapi hasilnya juga nihil sehingga lama kelamaan ketiadaan pengembangan dan pemeliharaan situs menyebabkan *SiMOLEK* berhenti dengan sendirinya.

## 3) *Leadership*

Kepemimpinan berperan sangat sentral dalam penciptaan organisasi yang inovatif serta kolaboratif. Resonansi kepemimpinan akan sangat mempengaruhi rangsangan kreatifitas sumber daya aparatur dalam menciptakan karya-karya yang inovatif demi menciptakan nilai lebih pada pencapaian misi organisasi (Mihaela:2021). Kepemimpinan secara operasional akan terlihat dari visi dan misi yang diemban oleh seorang pemimpin, yang dari visi dan misi itulah akan menentukan kebijakan apa yang akan ditempuh, dilanjutkan, ditingkatkan ataupun diberhentikan.

Pergantian kepemimpinan di *Ditjen Bina Keuda* menjadi alasan dari ketidakberlanjutan pengoperasian aplikasi *SiMOLEK*. Alasannya cukup logis dan brilian yakni *SiMOLEK* akan dikonversi ke dalam sebuah *super apps*, yang tidak hanya menyediakan layanan proses pertanggungjawaban *APBD* akan tetapi proses keuangan daerah dari hulu hingga hilir bahkan korelasi penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja akan tersaji dalam aplikasi baru tersebut. Proses bisnis *SiMOLEK* dalam aplikasi terbaru akan lebih disederhanakan sehingga lebih mudah digunakan. Seperti diungkapkan oleh pranata komputer yang mengembangkan *SiMOLEK*, bahwa adanya kehadiran *Direktur Jenderal* yang baru membawa angin segar dalam penciptaan dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah. Dengan tagar *#keudagoesdigital*, menjadi jargon kepemimpinan beliau yang menjadi kacamata bagi seluruh aparatur di lingkungan *Ditjen Bina Keuda* untuk lebih berkreatif dan berinovatif dalam menciptakan



# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

layanan yang terbaik. Sehingga dalam konteks ini, SiMOLEK tidak dalam arti literal dihentikan pengoperasiannya akan tetapi ditingkatkan performanya dengan mengintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi umum keuangan daerah.

#### 4) *Technology*

Pola hubungan disrupsi teknologi dengan disrupsi inovasi menjadi pusat perhatian para peneliti saat ini. Banyak literatur yang menunjukkan terdisripsinya layanan informasi disebabkan karena kegagalannya dalam mengadopsi kemajuan teknologi terbaru (Li et al., 2018) Dari faktor teknologi ini merupakan salah satu penyebab ketidakberlanjutan aplikasi SiMOLEK sebagai sistem informasi evaluasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang seharusnya mengadopsi perkembangan teknologi terbaru untuk pemeliharaan performanya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi dukungan teknis dan teknologi, menyatakan bahwa penerapan sistem informasi dalam sektor pemerintahan harusnya terstandarisasi sesuai arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang salah satunya menghendaki pengelolaan sistem informasi tidak lagi bersifat monolitik akan tetapi harus bersifat *microservices*. Dari standar tersebut, SiMOLEK tidak masuk dalam kualifikasi SPBE karena masih bersifat monolitik. Pembaharuan server SiMOLEK juga tidak dilakukan secara berkala sehingga menyebabkan SiMOLEK menjadi terbengkalai dan tidak berkembang sebagaimana mestinya. Data security pada aplikasi SiMOLEK masih sangat rentan karena tidak adanya kapasitas keamanan siber dalam mengawal proses pengoperasian SiMOLEK, padahal aplikasi ini merupakan sistem informasi keuangan daerah yang berisikan informasi penting dan vital tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga secara kumulatif sangat beresiko bagi keamanan negara. Dari rentetan uraian inilah menyebabkan keberadaan SiMOLEK menjadi “hidup segan, mati tak mau” yang pada akhirnya keberadaannya terhenti dengan sendirinya.

#### 5) *Culture*

Budaya organisasi dapat menjadi penghambat dalam keberlanjutan inovasi apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak terpelihara dengan baik dimana organisasi yang bersifat dan berbudaya adokrasi akan sangat memberikan pengaruh positif terhadap tumbuhnya kreatifitas dan inovasi dan sebaliknya budaya organisasi yang kaku dan sangat hirarkis akan membuat terhambatnya lahirnya inovasi (Jan et al, 2014). Di lingkungan Ditjen Bina Keuda memiliki aura positif dalam mendorong aparaturnya untuk berinovasi dan berusaha melepaskan diri dari patronase belenggu birokrasi yang dinilai kaku dan terlalu berorientasi pada pola-pola organisasi tradisional yang bersifat *rule-based*.

Budaya positif inilah yang mendorong lahirnya SiMOLEK, seperti penuturan staf pengembang teknologi yang terlibat dalam pengembangan SiMOLEK. Beliau menjelaskan bahwa SiMOLEK lahir dari dorongan batin para karyawan tanpa ada intervensi keuangan sedikitpun. Hal ini bisa demikian, karena semangat berinovatif dan kompetitif antar pegawai tercipta dengan antusias dan harmonis. Bahkan untuk memotivasi pegawai berinovasi, Ditjen Bina Keuda memberikan insentif bagi pegawai yang memiliki inovasi yang berdampak pada peningkatan nilai tambah kinerja organisasi. Akan tetapi keberlanjutan sebuah inovasi, faktor budaya tidaklah cukup, ada banyak faktor yang turut serta mempengaruhi seperti faktor pendanaan dan lain sebagainya.

#### 6) *Lack Of Technical Skill*

Keberlanjutan inovasi sangat bergantung pada kemampuan teknis para aparatur di sektor publik (OECD, 2011). Tidak hanya persoalan teknis pengembangan teknologi atau aplikasi, tetapi kemampuan teknis dalam pengetahuan yang spesifik menjadi daya ungkit sebuah inovasi.

Keberadaan SiMOLEK sebagai aplikasi keuangan daerah tidak terlepas dari proses kolaborasi antara para pegawai yang memiliki kemampuan teknologi informasi dan pegawai yang memiliki kempaan teknis keuangan daerah yang baik. Kepala Seksi Dukungan

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Teknis dan Teknologi menceritakan bahwa proses kelahiran SiMOLEK merupakan jerih payah dari kerjasama yang tercipta antara pegawai dukungan teknis yang mengembangkan pemograman melalui penterjemahan proses bisnis yang dibuat oleh pegawai Ditjen Bina Keuda lainnya. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa ketidakberlanjutan aplikasi SiMOLEK ini tidak memiliki kaitan dengan *skill set* yang dimiliki oleh para pegawai.

#### D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

SiMOLEK merupakan salah satu system informasi keuangan daerah yang merupakan inovasi dalam bidang layanan proses evaluasi pertanggungjawaban keuangan daerah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah faktor yang menjadi penghambat keberlanjutan penerapan SiMOLEK ini yaitu *politic, finance, technology* dan *leadership*.

Perubahan arah politik pengambilan kebijakan menyebabkan berubahnya orientasi organisasi dalam keberlanjutan SiMOLEK. Keterbatasan dana juga sangat berpengaruh dengan alasan adanya program lain yang dianggap prioritas. Proses adopsi teknologi yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan SiMOLEK akan digantikan dengan aplikasi yang lebih baru dan mumpuni. Kemudian kepemimpinan yang dalam hal ini terdapat penggantian kepemimpinan di Ditjen Bina Keuda membuat kebijakan agar SiMOLEK nantinya dikonversi ke dalam sebuah super apps, yang tidak hanya menyediakan layanan proses pertanggungjawaban APBD akan tetapi proses keuangan daerah dari hulu hingga hilir. Sedangkan faktor *culture* dan *technical skill* tidak menjadi faktor penghambat keberlanjutan SiMOLEK, bahkan justru faktor-faktor ini yang menjadi embrio lahirnya SiMOLEK.

Untuk mengantisipasi kebutuhan pelaksanaan evaluasi pertanggungjawaban APBD tanpa adanya SiMOLEK, maka langkah dan upaya yang ditempuh oleh Ditjen Bina Keuda dinilai sudah tepat yakni dengan menciptakan aplikasi yang bersifat *micro*

*services* dan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SPBE. Dimana pada aplikasi tersebut, fungsi evaluasi pertanggungjawaban APBD telah terakomodir di dalamnya. Akan tetapi hal yang perlu menjadi poin masukan bagi Ditjen Bina Keuda, agar dalam melakukan penggantian atau transisi teknologi maka disiapkan terlebih dahulu “aplikasi antara” agar tidak terjadi kekosongan sistem informasi yang dijadikan sebagai instrumen dalam pelaksanaan pelayanan yang merupakan tugas dan fungsi Ditjen Bina Keuda.

#### REFERENSI

- A.R.D. Silva, F.A.F. Ferreira, E.G. Carayannis and J.J.M. Ferreira, "Measuring SMEs' propensity for open innovation using cognitive mapping and MCDA," IEEE Transactions on Engineering Management, pp. 1-12, 2019.
- Adyawardman. (2021). The Challenges of Public Innovation : Insights From Risk Governance in Batang Regency. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, 25(1), 1-24.
- Agger, A., & Sørensen, E. (2018). Managing collaborative innovation in public bureaucracies. Planning Theory, 17(1), 53-73.
- Alexandru (2021). The Impact of Leadership on Innovation in Organizations. 2nd International Conference on Research in Management
- Bambang Pamungkas. Evaluasi Implementasi Anggaran Belanja Sebagai Sarana Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. 1(1) 2013.
- Chen, J., Walker, R. M., & Sawhney, M. (2020). Public service innovation: a typology. Public Management Review, 22(11), 1674-1695.
- Creswell. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset (3rd ed.). Pustaka Pelajar
- Deby, L., Putri, M., & Mutiarin, D. (2018). Efektifitas inovasi kebijakan publik; Pengaruhnya pada kualitas pelayanan publik di Indonesia. Prosiding Konferensi Nasional Ke-



# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA), 1-16.
- E. Cinar, P. Trott and C. Simms, “A systematic review of barriers to public sector innovation process,” *Public Management Review*, vol. 21(2), pp264-290, 2019.
- Godenhjelm, S., & Johanson, J. E. (2018). The effect of stakeholder inclusion on public sector project innovation. *International Review of Administrative Sciences*, 84(1), 42-62.
- Handayani, W., Karunia, R. L., & Sutrisno, E. (2023). Penyusunan Tarif PNBPN untuk Layanan Reuse dan Recycle Sumber Radioaktif Tertutup Limbah Radioaktif Tidak Terpakai di Unit Instalasi Pengolahan Limbah Nuklir BRIN. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 29-43. <https://doi.org/10.33059/jseb.v15i1.7597>
- Hapzah, S. N., Rianto, B., & Tamrin, M. H. (2020). Tata kelola inovasi pelayanan publik: dimensi kelembagaan, aktor kebijakan dan masyarakat. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 5(2), 153-164.
- Harahap, A.S., Zulvia, P. (2023). Analisis Pengembangan Smart City berdasarkan Dimensi Teknologi, Sumber Daya Manusia, dan Institutional di Kota Padang Panjang. *Klik: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer*, 4 (1), 618 - 624. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i1.1200>
- Harahap, A., Zulvia, P. (2021). Klusterisasi Desa dengan Menggunakan Algoritma K-Means pada Data Potensi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 237 - 246. <http://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3724>
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). Evaluation of Local Government Innovation Program in Lampung Province. *Jurnal Bina Praja*, 10(2), 241-250.
- Jan M, Shah S, Khan K (2014). The Impact of Culture on Innovation: The Moderating Role of Human Capital. *International Journal of Accounting and Financial Reporting* (2014) 1(1) 607
- Li M, Porter A, Suominen A (2018). Insights into relationships between disruptive technology/innovation and emerging technology: A bibliometric perspective. *Technological Forecasting and Social Change* (2018) 129 285-296
- Lukman, I. B. (2021). Rethinking Public Sector Innovation in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 564(Icas 2020), 59-67.
- Madeira, M.J., J. Carvalho, J.R. Miguel Moreira, F.AP. Duarte and F. de São Pedro Filho, “Barriers to innovation and the innovative performance of Portuguese Firms,” *Journal of Business*, vol. 9(1), pp. 2-22, 2017.
- Mailinda dan Adrianto (2021). Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus D.I Yogyakarta). *Mimbar Hukum* 25(2) 231-243.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta.
- Nadeem M, Liu Z, Ali H, Younis A, Bilal M, Xu Y (2020) Innovation and Sustainable Development: Does Aid and Political Instability Impede Innovation?. *SAGE Open* (2020) 10(4)
- Novira, A., Suherman, N.P. (2023). Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7 (1), pp. 170 - 175.
- Puspitasari, A. S., & Novira, A. (2022). Evaluation of Deconcentration Funds in the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Central Java Province. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 6(2), 108-118. <https://doi.org/10.30741/assets.v6i>

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- 2.879
- Queyroi, Y., Carassus, D., Maurel, C., Favoreu, C., & Marin, P. (2020). Local public innovation: an analysis of its perceived impacts on public performance. *International Review of Administrative Sciences*.
- Rahmah, A., Ravenska, N., Taufik, N. I., & Purba, C. O. (2024). Implementing the PIECES Method in Assessing Debtor Satisfaction with SLIK at the Financial Services Authority (OJK) Office. *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 3(3), 293–301. <https://doi.org/10.56070/ibmaj.2024.032>
- Rosdiana, D., Karunia, R., & Sutrisno, E. (2024). Management of Operational Assistance Funds (BOS) in State Madrasah Tsanawiyah 15 Jakarta. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 773 -. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5058>
- Saltanat Akhmadi dan Mariza Tsakalerou. IEEE Technolofy & Engineering Management Conference. 2020
- Sutrisno, E., & Mabileti, A. (2023). Effective Village Fund Utilization Model In Alor Regency, East Nusa Tenggara. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(2), 278-302. <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i2.751>
- Taufik, N.I., Sulistianti, I., Pradesa, H.A. (2022). Penilaian risiko pada layanan pembayaran pensiun PT Asabri Bandung: Sebuah praktek terbaik untuk penguatan tata kelola perusahaan. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5 (2), 857-867. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1729>
- Taufik, N.I., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>
- Trivellato, B., Martini, M., & Cavenago, D. (2021). How Do Organizational Capabilities Sustain Continuous Innovation in a Public Setting? *American Review of Public Administration*, 51(1), 57–71.
- Van Acker, W., & Bouckaert, G. (2018). What makes public sector innovations survive? An exploratory study of the influence of feedback, accountability and learning. *International Review of Administrative Sciences*, 84(2), 249–268.
- Yanuar, R. M. (2019). Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus: Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 04(0274), 20.
- Yin, R. (2006). Studi Kasus: Desain dan Metode. *Grafindo Persada*. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/studi-kasus-desain-dan-metode/>.
- Yin X, Qi L, Ji J, Zhou J (2023) How does innovation spirit affect R&D investment and innovation performance?. The moderating role of business environment. *Journal of Innovation and Knowledge* (2023) 8(3)
- Yulianto Kadji. *Formulasi dan Imlementasi Kebijakan Publik*. 2015.
- Yuliasti (2021). Urgensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Katalogis* 5(4), 160-171.